

**PEMBINAAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN KELOMPOK
USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
DI KORONG BATIAH-BATIAH**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah sebagai
salah satu Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh

**TRIANA RISA PUTRI
NIM 1100477/2011**

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

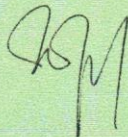
Pembinaan Perempuan Dalam Pengelolaan Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Korong Batiah-Batih

Nama : Triana Risa Putri
Nim/BP : 1100477/2011
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Januari 2016

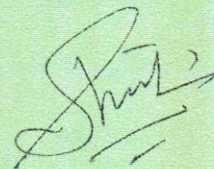
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dra. Wirdatul Aini, M.Pd
NIP 19610811 198703 2 002

Pembimbing II



Dra. Setiawati, M.Si
NIP 19610919 198602 2 001

PENGESAHAN

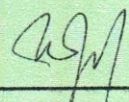
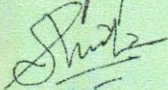
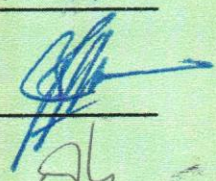
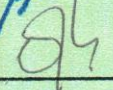
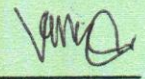
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Penguji Skripsi Jurusan
Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pembinaan Perempuan Dalam Pengelolaan Kelompok Usaha
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Korong Batiah-Batih**

Nama : Triana Risa Putri
NIM/BP : 1100477/2011
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Januari 2016

Tim Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Dra. Wirdatul 'Aini, M.Pd	1. 
2. Sekretaris : Dra. Setiawati, M.Si	2. 
3. Anggota : Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd	3. 
4. Anggota : Dr. Solfema, M.Pd	4. 
5. Anggota : Vevi Sunarti, S.Pd, M.Pd	5. 

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Pengelolaan Kelompok Usaha Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat di Korong Batiah-Batiah”
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali pembimbing,
3. Didalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan didalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepustakaan,
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan didalam pernyataan ini saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Januari 2016



Yang membuat pernyataan

Iriana Risa Putri

ABSTRAK

Triana Risa Putri (2011): Pembinaan Perempuan Dalam Pengelolaan Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Korong Batiah-Batih

Penelitian ini dilatar belakangi oleh lancarnya kegiatan kelompok usaha simpan pinjam perempuan, terlihat semua kegiatan dan perkembangan usaha dari anggota kelompok usaha lancar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan (1) perencanaan kelompok usaha, (2) pelaksanaan kelompok usaha, (3) pengawasan kelompok usaha.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi berjumlah 24 orang. Penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel, karena seluruh populasi yang dijadikan responden sebanyak 24 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sedangkan alat pengumpul data dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan rumus persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kelompok usaha simpan pinjam perempuan yaitu (1) perencanaan pembinaan kelompok usaha sudah disusun dengan baik, (2) pelaksanaan pembinaan kelompok usaha berjalan dengan lancar, (3) pengawasan pembinaan kelompok usaha sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar kegiatan ini tetap berjalan kedepannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pembinaan Perempuan dalam Pengelolaan Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Korong Batiah-Batih.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Dra. Wirdatul 'Aini, M.Pd Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP), sekaligus Pembimbing I dan Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberikan keyakinan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Mhd. Natsir, S.Sos.i, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP).
3. Ibu Dra. Setiawati, M.Si selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan keyakinan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah serta Karyawan dan Karyawati yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga yang telah memberi semangat dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman Jurusan Pendidikan Luar Sekolah khususnya angkatan 2011 yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan masukan baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah	11
C. Batasan masalah	11
D. Rumusan masalah	12
E. Tujuan.....	12
F. Partanyaan penelitian.....	12
G. Manfaat penelitian	13
H. Definisi operasional	13
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pendidikan non formal.....	19
B. Pembinaan perempuan	20
C. Pengelolaan Kelompok Usaha	21
D. Simpan pinjam perempuan	51
E. Program nasional pemberdayaan masyarakat	55
F. Penelitian terdahulu	59
G. Kerangka Koseptual.....	58

BAB III METODELOGI PENELITIAN	59
A. Jenis penelitian.....	59
B. Populasi dan sampel.....	59
C. Jenis dan sumber data.....	60
D. Teknik dan alat pengumpulan data	61
E. Teknik analisis data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	63
A. Hasil penelitian	63
B. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Nama Anggota Kelompok Usaha Simpan Pinjam	7
2. Pembinaan dalam Perencanaan KegiatanKelompok UsahaSimpan Pinjam Perempuan PNPM-LMP Di Korong Batiah-Batiah.....	64
3. Pembinaan Dalam Pelaksanaan KegiatanKelompok Usaha Dana Bergilir Simpan Pinjam Perempuan PNPM-LMP Di Korong Batiah- Batiah.....	67
4. Pembinaan Dalam Pengawasan Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan PNPM-LMP Di Korong Batiah-Batiah	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kerangka koseptual.....	58
2. Perencanaan kelompok usaha simpan pinjam.....	65
3. Pelaksanaan kelompok usaha simpan pinjam	69
4. Pengawasan kelompok usaha simpan pinjam	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu kemiskinan. dan yang seperti kita ketahui bahwa fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah-masalah baru, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat.

Kemiskinan merupakan momok permasalahan yang harus dihadapi oleh negara, tidak memandang negara maju atau negara berkembang, seperti Indonesia. Problematika kemiskinan merupakan problematika yang sangat kompleks, kemiskinan terkait erat dengan problem-problem lain seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, problem kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kekurangan, pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi juga sebab-sebab lain seperti, tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan, masalah sedikit dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, pengangguran yang terus bertambah, masalah gizi dan kesehatan masyarakat, dan budaya malas atau bahkan disebabkan oleh pemerintah yang korup yang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, kemiskinan sebagai suatu potret permasalahan global, merupakan problem yang harus segera dituntaskan, baik oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan atau pihak-pihak lain yang memiliki andil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sudajana (1991:222) mengemukakan “ Pendidikan Luar Sekolah sebagai bagian dari pendidikan nasional yang program-programnya berkaitan dengan berbagai faktor pembangunan, adalah wajar untuk memantapkan tugas pokoknya agar berorientasi pada perubahan masyarakat yang mungkin terjadi dimasa depan”. Dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan luar sekolah maka dapat dilaksanakan dalam bentuk yang melembaga atau tidak

Upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari memberikan bantuan langsung ke masyarakat hingga mengadakan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketika dihadapkan pada kondisi nyata masyarakat Indonesia, langkah lebih bijak apabila pemerintah dalam usaha menanggulangi kemiskinan membidik pada mentalitas masyarakat Indonesia.

Tujuan pemerintah bukan hanya memberikan bantuan pada masyarakat tetapi lebih kepada mengubah pola pikir masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia cenderung pasrah dalam menghadapi kenyataan hidup dan cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah, hal ini membuat masyarakat Indonesia menjadi pasif, malas dan lebih suka menerima dari pada memberi, sama artinya dengan lebih suka mencari kerja dari pada membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Indonesia selalu ada dalam bayang kemiskinan.

Peran dari Pendidikan Luar Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan suatu masyarakat. Menurut Sanapiah (2007:8), program pendidikan luar sekolah bila disimak aneka ragam programnya, akan tampak tertuju kearah dua muara, yaitu untuk pembelajaran kaum tertinggal

sehingga terbebas dari ketidaktahuan dan untuk pembelajaran kaum tersingkir (kaum miskin) sehingga terbebas dari kemiskinan (ketertinggalan).

Peran dan fungsi Pendidikan Luar Sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial agar terciptanya keseimbangan pembangunan, sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan tertinggal bisa teratasi.

Sejak individu dilahirkan didunia ini ia selalu dilingkupi oleh benda-benda. Kemudian terjadi interaksi dengan individu-individu yang lain dalam kelompok, sehingga dapat membentuk individu menjadi person dan mengubah sifat-sifat aslinya menjadi sifat-sifat kemanusiaan.

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan bawahan sehingga menjadi anggota yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat dikatakan sebagai tindakan, proses, hasil, atau pernyataan lebih baik.

“Pembinaan merupakan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti”. (Miftah, 1997:16-17)

Berdasarkan uraian diatas pembinaan yang dimaksud adalah melakukan tindakan, pembaharuan terhadap perempuan yang tidak memiliki pekerjaan, dan yang memiliki banyak waktu luang. Jadi mereka dibimbing untuk melakukan kegiatan sehingga ada perubahan dalam dirinya, yang sebelumnya tidak pandai

untuk membuka usaha, jadi bisa memiliki usaha, dan yang tidak bisa mengembangkan usahanya menjadi bisa untuk mengembangkan usahanya,

Menurut John D. Millet membatasi pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (Siswanto, 1987:4). Maka proses pengelolaan disini proses pengarahan rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok dan pencapaian tujuan. Menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif sangatlah penting oleh sebab itu pentingnya pengelolaan, agar mengetahui tentang hal-hal yang harus dilakukan dan memastikan bahwa tugas yang diselesaikan bergerak ke arah tujuan.

Pengelolaan kelompok usaha ini tidak lepas dari pengurus atau struktur yang bekerja dalam pencapaian tujuan kelompok usaha ini. Pengurus yang memegang kendali yang amat penting dalam mewujudkan efektivitas organisasi. Seberapa jauh organisasi mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sangat bergantung pada baik atau tidaknya pengurus organisasi yang bersangkutan mengoperasikan pekerjaannya. Ketika pengurus tidak baik dalam mengoperasikan pekerjaannya, niscaya organisasi tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuannya dengan baik pula..

Usaha pemerintah telah berbagai macam yang dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan program PNPM yang dimana ada bagian dari program PNPM tersebut adalah simpan pinjam perempuan. Dimana simpan pinjam ini

terdiri dari perempuan atau ibu-ibu yang membutuhkan modal untuk usaha dan tambahan modal usaha yang kekurangan modal usahanya.

Anggota dari kelompok ini adalah warga asli dimana mereka berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk asli di wilayah mereka menetap. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan ibu Eka Fitria Staff Kantor Wali Nagari, Kecamatan Enam Lingkung pada tanggal 23 September 2014 bahwa di Korong Batiah-Batiah ini ada 98 Kepala Keluarga, dari 98 Kepala Keluarga ini ada berjumlah 56 keluarga yang tergolong sejahtera, dan 42 Kepala Keluarga yang tergolong tidak mampu, berdasarkan program PNPM Kecamatan Enam Lingkung membentuk kelompok usaha simpan pinjam yang terbagi dua kelompok, pertama bernama kelompok SPP Limo Suku, dan yang kedua Batiah-Batiah Saiyo, peneliti tertarik melakukan penelitian di kelompok usaha Batiah-Batiah Saiyo, dikarenakan kelompok ini lebih baik, dan lancar kegiatan kelompoknya. Dilaksanakan program Simpan Pinjam Perempuan dibawah pengawasan program PNMP-LMP Kecamatan Enam Lingkung dimana dalam program ini alasan terbentuknya program ini adalah karena keadaan ibu-ibu di Korong Batiah-Batiah ini banyak yang sebagai ibu rumah tangga yang banyak waktu luang dan ada beberapa dari mereka yang mempunyai usaha kecil-kecilan yang berdagang kebutuhan sehari-hari maka mereka ingin untuk berdagang dan membuka usaha ada, akan tetapi dikarenakan modal yang tidak ada dan tidak mencukupi maka mereka mengharapkan pemasukan seadanya yang mereka dapat yang bersumberkan dari suami nya dan hasil dari pencarian dari berladang dan kesawah. Di kelompok usaha Batiah-Batiah Saiyo ini terdapat 24 anggota yang

mana 10 yang memiliki usaha tetapi mereka kekurangan modal, dan 14 mereka yang tidak memiliki modal, usaha, dan mereka ingin membuka usaha. Jadi dengan adanya program kelompok usaha simpan pinjam perempuan ini mereka bantu, dibimbing untuk melakukan kegiatan usaha.

Pembinaan yang diberikan kepada ibu-ibu tersebut berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam berwirausaha dan mengembangkan modal pembinaan untuk berwirausaha, modal yang dipinjamkan kepada mereka. Pembina dari kecamatan UPK-PNPM Enam Lingkung juga memberikan pembinaan kepada pengurus atau pembina melalui pelatihan dan bimbingan kelompok tentang bagaimana cara mengelola kelompok dan mengembangkan modal usaha yang diberikan kelompok Batiah-Batiah Saiyo yang diadakan oleh pembina dari kecamatan. Kalau bimbingan yang diberikan untuk kelompok berupa kunjungan kelompok diadakan sekali dalam 1 bulan, selain itu juga diadakan rapat bulanan dalam melakukan pembinaan untuk pengembangan usaha.

Program PNPM-LMP ini membentuk simpanan untuk ibu-ibu agar mereka terbantu untuk menambah kebutuhan mereka. Selain itu program ini bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan para perempuan yang tidak hanya menunggu dari suaminya, akan tetapi agar perempuan lebih produktif lagi dan mensejahterakan mereka baik dari segi keluarga, pendidikan dan yang lainnya. Disini ada terbentuk sebuah kelompok Simpan Pinjam yang bernama Batiah-Batiah Saiyo. Awal pembentukan kelompok ini syaratnya adalah ibu-ibu atau perempuan yang mempunyai KTP di Korong Batiah-Batiah, dan sebagai masyarakat miskin. Pembentukan kelompok ini pertama kalinya dengan cara

merekrut anggota yang dalam satu kelompok itu terdiri dari 25 orang maksimal. Jadi disini yang hanya ikut ada 24 orang, setelah terkumpul anggota maka dibentuk ketua, bendahara, dan sekretaris yang merupakan ditunjuk oleh anggota dan kesepakatan bersama anggota dengan UPK Kecamatan.

Berdiri nya kelompok ini pada Tahun 2011, dan pada tahap ini adalah tahap yang ke tiga. Besar pinjaman yang didapat oleh kelompok ini adalah Rp. 173.000.00 untuk perguliran dana nya. Cair dana 17 april 2013, dan angsuran berakhir semua nya pada bulan oktober 2014.

Tabel 1. Nama Anggota Kelompok Usaha Simpan Pinjam

No	Nama Anggota	Usaha
1	Ratna Dewi	Dagang Bahan Mentah
2	Eka Fitria	Ternak Ayam Petelur
3	Deti Yuzarni	Dagang Pakaian
4	Siti Maisyarah	Dagang Barang Harian
5	Desi	Warung Kopi
6	Mursida	Warung Kopi
7	Linda Kurnia T	Bordiran Mukena
8	Nofridayati	Bordiran Mukena
9	Nurlis	Ternak Ayam Potong
10	Gusti Y.M	Bordiran Mukena
11	Fatmawati	Dagang Kaki Lima
12	Sumarni	Berkebun Sayuran
13	Yulinar	Warung Kopi
14	Hari Murni	Berkebun Jagung
15	Erni Dewita	Dagang Barang Harian
16	Irma Yulita	Buka Salon,Jual Pulsa Elektrik
17	Fitri Zunita	Konter Hp
18	Nurhayati	Kebun Sayuran
19	Nursima	Kebun Sayuran
20	Fitri Laila	Kolam Ikan Air Tawar
21	Fitra Rahmi	Dagang Bahan Mentah
22	Neli berti	Dagang Sate
23	Waraida Asnita	Toko Pupuk
24	Liberti	Ternak Burung Puyuh

Sumber Data: Buku Kas Kelompok Batiah-Batiah Saiyo

Setelah itu dilakukan langkah-langkah untuk pemberian dana kepada anggota yang akan di setujui:

a. Pembahasan awal

Pembahasan awal ini dilakukan beberapa langkah yaitu:

- 1) Pengecekan administrasi
- 2) Kunjungan lapangan oleh Tim Pendanaan, UPK, Verifikasi.

b. Pembahasan Akhir

- 1) Penetapan jumlah pinjaman yang akan dicairkan kepada penerima manfaat
- 2) Dilakukan musyawarah antar desa untuk memberitahu jumlah besar pinjaman
- 3) Pembudalan dokumen (surat perjanjian, dan administrasi pendukung)

c. Penyerahan dana

Kegiatan ini jumlah dana modal yang dipinjamkan untuk modal usahanya berkisar dari 1 juta -10 juta. Dan pengembalian modal ini dengan cara angsuran perbulan. Dan sistem pembayaran nya dipotong dengan bunga perbulan, bunganya perbulan 10%. Dari semua anggota ini membayar perbulan rata-rata semua membayar dengan tepat waktu.

Mereka dari anggota hanya memiliki usaha yang kecil dan ada yang membuka usaha juga bekerjasama dengan orang lain atau bagi hasil, dan ada juga mereka yang hanya modal sedikit sehingga anggota kelompok simpan pinjam ini barang yang dijual pun juga sedikit. Setelah dapat pinjaman ini mereka sangat terbantu, perkembangan yang ada anggota nya yang menjual bahan harian yang biasanya hanya memiliki kedai kecil dan barang isi kedai nya sedikit sekarang

sudah banyak, dan semua anggota mengalami perkembangan yang sangat baik dimana usaha-usaha nya berkembang. Anggota yang berternak ayam petelur dan ayam potong biasanya sedikit sekarang bertambah pula jumlah ayam nya. Dan dilihat berdasarkan observasi peneliti mereka sudah memiliki usaha yang berkembang.

Winardi (1986:4) menyatakan pengelolaan adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Keberhasilan dari anggota memanfaatkan dana ini dikarenakan oleh pengelola yang terdiri dari UPK Kecamatan, ketua, sekretaris dan bendahara bagaimana cara mereka melakukan tindakan dan mengambil keputusan dalam mengelola kelompok dan kerjasama mereka ketika ada halangan yang ada, dan dari tindakan perencanaan sampai pengawasan. Disini diantara pengelola dan anggota saling terbuka, saat pengembalian dana dimana dicatat di sebuah buku agar bisa dilihat siapa yang belum memberikan penyeteroran setiap bulan.

UPK Kecamatan dan ketua, bendahara, dan sekretaris juga melakukan tindakan meninjau dan melihat usaha mereka, apakah mereka memang benar-benar menggunakan dana itu untuk usaha atau tidak, jika anggota menyalahgunakan maka anggota ini diberikan sanksi berupa peringatan dan hukuman penjara. Akan tetapi selama kelompok ini berjalan belum ada yang melakukan penyelewengan, dan ini dikarenakan pengelola benar-benar melihat anggota apa yang diberikan atau tidak.

Wawancara peneliti lakukan pada 23 September 2014 dengan Fitri Laila sebagai anggota kelompok SPP bahwa mereka mengatakan sangat terbantu dengan kegiatan SPP ini, dan semua pengurus kelompok SPP Batiah-Batih Saiyo PNPM-LMP ini mengelola semua keuangan, penyetoran dan anggota sangat baik. Sehingga masalah dan hambatan yang ditemui terselesaikan dengan baik. Dan respon semua pihak positif, dikarenakan semua sangat membantu dan berjalan lancar.

Hasil pengamatan dan wawancara, kegiatan kelompok usaha ini sangatlah bermanfaat bagi anggota terlihat dari perkembangan usaha mereka, yang dari tidak memiliki usaha menjadi memiliki usaha dengan dapat pinjaman modal, yang kekurangan modal dapat penambahan modal, selain itu pengurus dalam mengelola kegiatan kelompok usaha ini adalah orang yang dipercaya yang dapat mengelola kelompok ini. Kegiatan kelompok ini berjalan dengan lancar, terlihat dari pengurus yang menyelesaikan masalah dan melakukan pengelolaan kegiatan secara baik. Tak terlepas dari perencanaan yang matang dari pengurus untuk menjalankan kegiatan ini agar tujuan dari kegiatan ini tercapai dengan yang diinginkan oleh seluruh pengurus dan anggota. Dan anggota yang mengembalikan dana (penyetoran) setiap bulannya tepat pada waktu yang telah ditetapkan, mereka sadar akan kewajibannya dengan melakukan penyetoran tersebut, sehingga tidak ada mereka yang telat melakukan penyetoran.

Peneliti tertarik untuk mengetahui tentang “pembinaan perempuan dalam pengelolaan kelompok usaha simpan pinjam perempuan (spp) program nasional pemberdayaan masyarakat - lingkungan mandiri perdesaan (PNPM-LMP) Korong

Batiah-Batiah, Nagari Gadur, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan semua kegiatan Kelompok Usaha Simpan Pinjam sudah baik.
2. Kepercayaan anggota terhadap ketua dalam kegiatan Kelompok Usaha simpan pinjam perempuan di kelompok SPP di Batiah-Batiah Saiyo PNPM-LMP Enam Lingsung.
3. Tanggung jawab ketua kepada anggota dalam kegiatan Kelompok Usaha simpan pinjam perempuan di kelompok SPP Batiah-Batiah Saiyo PNPM-LMP Enam Lingsung.
4. Ketegasan ketua dalam kegiatan Kelompok Usaha simpan pinjam perempuan di kelompok SPP Batiah-Batah Saiyo PNPM-LMP Enam Lingsung.
5. Motivasi dan minat dari dalam diri anggota ingin membuka usaha dan mengembangkan usaha nya.

C. Batasan Masalah

Banyak faktor yang melatarbelakangi keberhasilan pada kegiatan kelompok usaha simpan pinjam perempuan di Korong Batiah-Batiah, maka peneliti membatasi pada pengelolaan kelompok usaha simpan pinjam (SPP) yaitu Pembinaan Perempuan dalam Pengelolaan Kelompok Usaha Simpan Pinjam (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Korong Batiah-Batiah dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana pembinaan perempuan dalam pengelolaan kelompok usaha simpan pinjam perempuan (spp) program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) di Korong Batiah-Batih, Nagari Gadur, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman?*”.

E. Tujuan

Mengetahui pembinaan dalam kegiatan pengelolaan kelompok SPP Kelompok Batiah-Batih Saiyo ditinjau dari aspek:

1. Pembinaan dalam perencanaan kegiatan kelompok usaha SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Korong Batiah-Batih.
2. Pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok usaha SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Korong Batiah-Batih.
3. Pembinaan dalam pengawasan kegiatan kelompok usaha SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Korong Batiah-Batih.

F. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah gambaran pembinaan dalam perencanaan kegiatan kelompok usaha SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Korong Batiah-Batih.
2. Bagaimanakah gambaran pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok usaha SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Korong Batiah-Batih.

3. Bagaimanakah gambaran pembinaan dalam pengawasan kegiatan kelompok usaha SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Korong Batiah-Batiah.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), khususnya tentang pengelolaan program.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan dan informasi bagi pengelola kelompok usaha Simpan Pinjam Perempuan agar lebih memperhatikan manfaat perpustakaan sebagai tempat untuk wadah meminjam modal usaha masyarakat.
- b. Bahan referensi bagi penelitian lain yang menelaah lebih lanjut mengenai pengelolaan kelompok usaha simpan pinjam perempuan PNPM-LMP.

H. Definisi Operasional

1. Pembinaan Perempuan

Musanef (1991:11) menyatakan “pembinaan merupakan segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya dan berhasil guna”.

Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan atas berbagai kemungkinan peningkatan, dan perbaikan atas sesuatu yang menekankan pada tindakan, proses, kegiatan agar mencapai pembaharuan.

Adapun yang dimaksud dengan pembinaan perempuan dalam penelitian ini adalah menunjukan kepada perbaikan, pembaharuan, dan perbaikan terhadap ibu-ibu yang ada di Korong Batiah-Batiah yang menjadi pengurus dan anggota dalam kegiatan kelompok usaha yang sebelumnya tidak memiliki usaha dan kekurangan modal usaha menjadi bisa membuka usaha dan bisa mengembangkan usahanya..

2. Pengelolaan Kelompok Usaha

a. Pengelolaan

Arikunto (1998:81) mengatakan, bahwa pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, pengawasan sampai dengan evaluasi/penilaian.

Pengelolaan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dari awal kegiatan hingga tercapainya tujuan yang ingin dicapai yakni kegiatan kelompok usaha simpan pinjam perempuan di kelompok Batiah-Batiah Saiyo di Korong Batiah-Batiah, Nagari Gadur. Yaitu dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

b. Kelompok Usaha

Sherif and Sherif (1956) menyatakan bahwa kelompok adalah suatu unit social yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi

social yang cukup intensif dan teratur sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu.

Taufik Baharuddin menyatakan usaha adalah kemampuan untuk melakukan atau menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang di idealkan.

Jadi kelompok usaha adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi yang anggotanya perempuan.

Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan kelompok usaha adalah sebuah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan:

1) Perencanaan

Suherman dalam Sudjana (1992:41) mengatakan bahwa “perencanaan adalah penentuan urutan tindakan, perkiraan biaya serta penggunaan waktu untuk suatu kegiatan didasarkan atas data dengan memperhatikan prioritas yang wajar dengan efisien untuk tercapainya tujuan.

Perencanaan pembinaan dalam kegiatan kelompok usaha dalam penelitian ini adalah upaya penyusunan rangkaian kegiatan pembinaan terhadap ibu-ibu kelompok usaha simpan pinjam perempuan di kelompok SPP Batiah-Batiah Saiyo dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap perencanaan pembinaan dalam pengelolaan kelompok usaha SPP adalah dengan tahap: pembentukan kelompok dan telah ada anggota kelompok, maka disusun pengurus. Pengurus dan anggota akan di beri pelatihan dan pengarahan Pengurus ini

diambil dari anggota kelompok itu sendiri dimana terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekerretaris. Dan setelah terbentuk pengurus maka akan pengisisan proposal oleh pengurus.

Perencanaan yang kata dasarnya “rencana” pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Jadi dalam penelitian ini melakukan perencanaan pembinaan yang menentukan semua tindakan melakukan perumusan rencana pembinaan kegiatan kelompok usaha selama satu tahun kedepan, pembentukan kelompok, perumusan tujuan, pembentukan kelompok dan perencanaan pengawasan pembinaan kegiatan kelompok usaha simpan pinjam perempuan.

2) Pelaksanaan

Gauzali (1993:166) menyatakan pelaksanaan merupakan manajemen yang paling utama karena dalam fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Pelaksanaan kegiatan merupakan penentuan bagi bawahan apa yang harus dikerjakan dengan pengarahan yang mencakup berbagai proses dan memerlukan metode untuk mengatur perilaku anggota dalam aktifitas-aktifitas tertentu dan menghindari aktifitas lainnya dengan menetapkan peraturan yang ada.

Pelaksanaan pembinaan kegiatan kelompok usaha merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh harus sejalan dengan kondisi yang ada baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan.

Pelaksanaan pembinaan kegiatan kelompok usaha adalah bagaimana melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, yang terdiri dari penentuan kegiatan, prosedur kerja pengurus, kegiatan yang dilakukan pengurus, dan partisipasi anggota.

3) Pengawasan

Dale (dalam Winardi, 2000:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Yang dimaksud pengawasan pembinaan dalam penelitian ini memantau, mengevaluasi kinerja pengurus dan mengevaluasi hasil anggota kelompok usaha dalam perkembangan usaha yang dilakukannya.

3. Simpan Pinjam Perempuan

Melayu SP Hasibuan (1996) menyatakan Simpan Pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyaurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat.

Jadi Simpan Pinjam Perempuan merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggotanya kaum perempuan untuk menyimpan dan meminjam untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan salah satu jalan untuk melengkapi, bagi warga yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Jadi, pendidikan nonformal dipandang sebagai pendidikan masyarakat, sehingga bentuk, tujuan, dan kegiatannya menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat

Aini (2006:17) “pendidikan nonformal juga ikut membantu pendidikan, terutama mengatasi anak yang tidak terlayani sekolah, putus sekolah, dan pendidikan kemasyarakatan”. Jalur pendidikan nonformal memiliki ciri yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Pendidikan non formal diharapkan mampu berperan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diperolehnya melalui sekolah, seperti:

1. Complement atau melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh didalam pendidikan sekolah, contohnya kursus, try out, pelatihan dan lain-lain
2. Supplement atau menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah, contohnya privat, les, training
3. Subsitute atau mengganti pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan (formal), contohnya kelompok belajar paket A, B dan C.

Pelaksanaanprogram pendidikan luar sekolah tidak terlepas dari rasa kepercayaan warga sekitar terhadap penerangan yang diberikan orang-orang PLS mengenai programnya kepada mereka.

Untuk membantu tujuan dari PLS tersebut salah satunya adalah dengan program yang diberikan kelompok usaha simpan pinjam perempuan pnpm-lmp. Oleh karena dengan ini diharapkan dapat membantu masyarakat akanmodal usaha dan untuk mensejahterakan kehidupan mereka baik melalui pendidikan dan keluarga mereka.

B. Pembinaan Perempuan

Musanef (1991:11) menyatakan “pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.

Suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, unsur dari suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada perbaikan atas perbaikan. Pembinaan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan.

Musanef (1991:11) menyatakan “pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga.

Jadi yang dimaksud dengan pembinaan perempuan adalah usaha-usaha pembinaan yang normatif menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan terhadap kaum perempuan agar menjadi mereka mengetahui informasi lebih mendetail tentang suatu kegiatan dimana mereka terlibat mengikutinya.

C. Pengelolaan Kelompok Usaha

1. Pengelolaan

Arikunto (1998:81) mengatakan, bahwa pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, pengawasan sampai dengan evaluasi/penilaian..

Pengelolaan adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi (Sudjana D, 2000: 17).

Soetopo (1982: 20) menjelaskan “pengelolaan adalah suatu proses pelaksanaan pencapaian tujuan melalui orang lain yang bermula dari perencanaan sampai kepada tahap evaluasi yang didalamnya terkandung seni dan ilmu”.

Kegiatan perencanaan, pengorganisaian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian ini tidak dilakukan seenaknya saja,karena setiap unsur memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka perlu memiliki sebuah kemampuan dan berfikir yang kritis dalam pelaksanaannya. Pengelolaan harus dilakukan secara bertahap dan sistematis demi mendapatkan hasil yang maksimal.

Pengelolaan memiliki beberapa fungsi, fungsi-fungsi tersebut berbentuk kegiatan yang berurutan dan saling berhubungan, sehingga satu kegiatan menjadi syarat bagi kegiatan yang lainnya. Morris dalam Sudjana (2004: 48) menyatakan bahwa “dalam fungsi pengelolaan terdapat suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga, kegiatan tersebut telah ditetapkan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya”. Untuk itu tidak sia-sia pengelola dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta penilaian dalam mengadakan sebuah program.

Jadi pengurus yang bekerja dan berfungsi dengan baik maka organisasi atau kelompok memiliki fungsi yang lebih luas dalam masyarakat. Keberhasilan suatu kelompok yang merupakan suatu kelompok adalah faktor kuci dalam masyarakat.

2. Kelompok Usaha

a. Kelompok

Sherif and Sherif (1956) menyatakan bahwa kelompok adalah suatu unit social yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi social yang cukup intensif dan teratur sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu.

Kelompok diciptakan oleh masyarakat dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lain, serta biasanya memiliki suatu kesukaan yang sama. Menurut Soerjono Soekanto kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan diantara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.

Devito (1997) mengatakan bahwa kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur diantara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma, atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya.

Soejono Soekanto menyatakan, suatu kelompok memiliki beberapa ciri utama yang menunjukkan kelompok:

- 1) Setiap anggota harus saling menyadari bahwa mereka adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok.
- 2) Adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok.
- 3) Adanya faktor yang mempererat kebersamaan para anggotanya, semisal persamaan nasib.
- 4) Memiliki sistem dan proses yang jelas dan dijalankan anggota kelompok.

Menurut Homans (1950): kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota setiap langsung.

Manfaat dari kelompok adalah: orang lain menjadi sumber informasi yang sangat penting, kelompok juga menjadi bagian penting dari identitas kita, yang mendefinisikan siapa diri kita, dan kelompok membantu menegakkan norma sosial, aturan yang eksplisit atau implisit mengenai perilaku yang dapat diterima.

b. Usaha

Taufik Baharuddin menyatakan usaha adalah kemampuan untuk melakukan atau menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang di idealkan.

Harmaizar mengatakan bahwa, usaha merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, didirikan dan berkedudukan disuatu tempat.

Skinner (1992) mengatakan bahwa usaha atau bisnis adalah pertukaran barang atau jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Jadi usaha dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia mendapatkan penghasilan baik berupa uang atau pun barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Oleh karena itu sasaran dari usaha atau keuntungan, baik diperoleh secara langsung atau tidak langsung.

c. Kelompok Usaha

Kelompok usah adalah himpunan dari keluarga dan perempuan yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota

memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Depsos RI, 2005).

Pengertian kelompok usaha adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga atau keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang atau keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Sasarannya adalah penerima bantuan stimulan pemberdayaan adalah para keluarga yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan kelompok usaha, namun kondisi usaha ekonomi produktifnya mengalami hambatan dan kegagalan dan memerlukan bantuan tambahan modal usaha.

1) Mekanisme kegiatan kelompok usaha

Kelompok usaha terdiri atas 10-20 orang (KK) fakir miskin yang telah terpilih melalui seleksi sebagai kelompok usaha adanya kemauan anggota kelompok usaha untuk bekerja secara kelompok dan adanya kesamaan minat dari anggota untuk melaksanakan suatu jenis usaha melalui kegiatan kelompok.

Kelompok usaha dibentuk berdasarkan musyawarah bersama antar anggota (hasil seleksi). Penentuan jenis kegiatan usaha kelompok dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan potensi alam yang ada. Terhadap kelompok yang telah terbentuk diberikan latihan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilaksanakan.

2) Kepengurusan

1) Ketua

Rincian tugas: bertanggung jawab kepada rapat kelompok, memimpin dan bertanggung jawab atas kelangsungan kelompok, memimpin seluruh kegiatan kelompok, membimbing dan mengawasi serta mengarahkan sekretaris dan bendahara kelompok membagi tugas atau menugasi anggota kelompok untuk melaksanakan sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok, mengambil keputusan sesuai dengan kebijaksanaan dan hasil musyawarah kelompok, berhubungan atau konsultasi dengan para pembina, melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dengan kesepakatan kelompok, memeriksa dan menutup buku kas serta memeriksa buku catatan administrasi lainnya dan melaporkan perkembangan kelompok usaha secara berkala pada anggota dan Pembina.

2) Sekretaris

Membantu ketua dalam melaksanakan administrasi kelompok, mewakili ketua apabila berhalangan, mengundang rapat kelompok atas perintah ketua, mencatat hasil keputusan rapat kelompok, mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota, menyusun laporan untuk rapat kelompok, mengisi buku administrasi kelompok dan membantu ketua dalam memimpin kegiatan kelompok.

3) Bendahara

Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang kelompok usaha, menyimpan segala penerimaan keuangan kelompok, membayar dan atau mengeluarkan uang untuk sesuatu keperluan yang telah disetujui oleh ketua, membuat buku catatan

pembantu tentang usaha ekonomi produktif kelompok, melaporkan keadaan keuangan kelompok usaha dalam rapat kelompok, musyawarah kelompok merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam hal antara lain: memilih dan menetapkan pengurus kelompok usaha, menentukan pembagian kerja anggota kelompok, menentukan kebijaksanaan, langkah serta keputusan, bersama-sama dengan pengurus membuat rincian tugas pengurus dan anggota kelompok usaha.

3. Mekanisme Pengembangan Bantuan

a. Perguliran

Setiap kelompok usaha yang mendapatkan bantuan diwajibkan melaksanakan perguliran kepada warga lain yang membutuhkan disekitarnya baik secara perorangan maupun secara kelompok jumlah dan besarnya dana yang digulirkan sesuai dengan bantuan stimulant yang diterima adapun waktu pelaksanaan perguliran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota kelompok dengan Pembina.

b. Pembagian hasil atau keuntungan

Pengelola bersama kelompok bertanggung jawab terhadap pembagian keuntungan atau kerugian yang diderita kelompok. Setiap keuntungan atau kerugian wajib dilaporkan kepada seluruh anggota. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan kelompok atau didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab anggota.

Pengelolaan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Begitu juga dengan usaha yang dilakukan sangat membutuhkan pengelolaan yang baik dari semua pihak. Yang terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tindakan pengelolaan dalam penelitian ini adalah:

a. Perencanaan

Suherman dalam Sudjana (1992:41) mengatakan bahwa “perencanaan adalah penentuan urutan tindakan, perkiraan biaya serta penggunaan waktu untuk suatu kegiatan didasarkan atas data dengan memperhatikan prioritas yang wajar dengan efisien untuk tercapainya tujuan.

Sudjana (1992:41) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang.

Gonzali (1993:40) menyatakan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang telah disusun dan dapat dilaksanakan sehingga dapat berperan sebagai acuan atau pedoman oleh para pelaksana dilapangan dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu rencana yang dibuat dapat berjalan dengan baik yaitu:

- 1) Sederhana jelas prioritasnya dan mudah dimengerti oleh para pelaksana yang mencakup semua kegiatan pokok.
- 2) Disertai rincian yang jelas tentang tata cara metode kerja, penggunaan biaya, waktu, pengawasan, dan tujuan yang ingin dicapai.
- 3) Tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan.
- 4) Luwes, memberi peluang untuk perbaikan ketika dilaksanakan.
- 5) Harus didukung oleh segenap personil dalam organisasi.

Waterson dalam Sudjana, (2000:61) perencanaan merupakan usaha sadar dan terorganisasi dan terus menerus dilakukan untuk memilih alternatif tindakan guna mencapai tujuan..

Perencanaan merupakan proses sistematis melalui kegiatan penyusunan dan pengambilan keputusan tentang tindakan yang dilakukan setelah mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Hasibuan (2000) perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

Selanjutnya langkah-langkah perencanaan menurut Sudjana (1993:41) menyatakan bahwa perencanaan adalah penentuan tindakan perkiraan biaya serta penggunaan waktu untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas data dengan prioritas yang wajar dan efisien untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu rencana yang dibuat dapat berjalan dengan baik:

- 1) Sederhana, jelas prioritas nya dan mudah dimengerti oleh para pelaksana yang mencakup semua kegiatan pokok
- 2) Disertai rincian yang jelas tentang cara metode kerja penggunaan biaya, waktu, pengawasan dan tujuan yang ingin dicapai
- 3) Tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan
- 4) Luwes, memberipeluang untuk perbaikan ketika dilaksanakan
- 5) Harus didukung oleh segenap personil dalam organisasi

Menyusunrencana Kamars (2004:24) mengemukakan hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan sbelum rencana disusun yaitu:

- 1) Merumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan organisasi yang didirikan

- 2) Tenaga yang tersedia ditinjau dari jumlah mutu dan jenis keahlian
- 3) Dana yang tersedia
- 4) Dan faktor-faktor pendukung lainnya

Pengertian dan prinsip-prinsip di atas dapat dijelaskan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam perencanaan berkaitan dengan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Kegiatan perencanaan itu dilakukan dengan alasan : pertama untuk mewujudkan kemajuan atau keberhasilan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan alasan kedua, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, kondisi yang sama atau lebih rendah dari pada keadaan pada saat ini. Perencanaan memberi arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta siapa pihak yang terlibat dalam tindakan atau kegiatan itu. Perencanaan melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan dilalui atau dilaksanakan. Perkiraan itu meliputi kebutuhan, kemungkinan-kemungkinan keberhasilan, sumber-sumber yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, serta kemungkinan resiko dari suatu tindakan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang akan dilakukan. Prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi atau kepentingannya, relevansi dengan kebutuhan, tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang tersedia, dan hambatan yang mungkin dihadapi. Perencanaan sebagai titik awal untuk dan arahan dalam kegiatan pengorganisasian, pergerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan, pendapat Sudjana (2004 : 92) “perencanaan adalah memilih dan menjawab; (1) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan; (2) mengapa upaya itu dilakukan; (3) Dimana dan dalam situasi apa usaha itu dilakukan; (4) Siapa orang-orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan kegiatan itu; (5) Bagaimana cara melaksanakannya; (6) Berapa dana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan itu”.

George R. Terry (1975) menyatakan perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Perencanaan dalam buku *Manajer Bijak* yang ditulis Sam Deep dan Lyie Sussman memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dituangkan secara tertulis
- 2) Diuraikan secara jelas dalam bentuk hasil akhir yang hendak dicapai
- 3) Disusun oleh orang kaya yang juga akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya
- 4) Sebelum dilaksanakan rencana tersebut telah dikomunikasikan kepada semua bagian yang terkait untuk mendapatkan komentar atau masukan.
- 5) Ada satu orang yang memikul tanggung jawab akhir yang mengawasi pelaksanaannya.
- 6) Ada tanggal tertentu yang menjadi batas waktu penyelesaian dan ada batas waktu yang lain ditetapkan.

Pada tahap perencanaan ini dilakukan pembentukan kelompok simpan pinjam yang mana kelompok tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga yang

membutuhkan tambahan modal. Dimana dalam pembentukan kelompok ini adalah warga masyarakat asli di Korong Batiah-Batiah. Setelah ada kelompok maka dibentuk pengurus, diambil dari anggota kelompok itu sendiri, dan dimana pengurus kelompok tersebut terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris. Setelah ditunjuk pengurus maka dilakukan pengisian proposal oleh pengurus. Dengan tujuan untuk merencanakan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan oleh anggota kelompok.

Proposal pengajuan berisi tentang:

- 1) Surat pengantar
- 2) Surat pengajuan kredit
- 3) Data profil kelompok dan profil masing-masing anggota
- 4) Daftar pengurus dan anggota kelompok calon peminjam
- 5) Rencana angsuran kelompok
- 6) Surat pernyataan kesanggupan kelompok dan anggota untuk tanggung renteng
- 7) Fotocopy kartu penduduk masing-masing calon peminjam

Persentase jasa dikelompok 2 %, 1% untuk jasa pengurus, 1% untuk jasa SHU. 10% UPK, yaitu untuk pengembangan kelompok baru dikecamatan.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah upaya penyusunan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya suatu program yang meliputi penetapan dan, tujuan, jadwal kegiatan penentuan potensi sumber daya yang tersedia serta bentuk rancangan program kegiatan.

Fungsi dari perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan berbagai masalah.
- 2) Menentukan prioritas masalah
- 3) Menentukan tujuan dan indicator keberhasilan
- 4) Mengkaji hambatan dan kendala
- 5) Menyusun rencana kerja operasioanal

Sedangkan manfaat perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang.
- 2) Dimungkinkan melakukan pilihan dari berbagai alternatif tindakan.
- 3) Mengarahkan perhatian pada tujuan.
- 4) Merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan.
- 5) Memudahkan melakukan koordinasi diantara berbagai organisasi
- 6) Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, sehingga menghemat waktu, usaha dan dana.

Tahap-tahap perencanaan:

- 1) Perumusan tujuan, pada tahap ini penyusun perencanaan harus merumuskan tujuan yang hendak di capai di masa yang akan datang.
- 2) Perumusan kebijaksanaan, yakni merumuskan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam bentuk tindakan-tindakan yang terkoordinir terarah dan terkontrol.
- 3) Perumusan prosedur, yakni menentukan batas-batas dari masing-masing komponen (sumberdaya).

- 4) Perencanaan skala kemajuan, merumuskan standar hasil yang akan diperoleh melalui pelaksanaan aktivitas pada waktu tertentu.
- 5) Perencanaan bersifat menyeluruh, maksudnya setelah tahap a s/d d dirumuskan dengan baik.

Persyaratan yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Harus didasarkan pada tujuan yang jelas, maksudnya semua komponen perencanaan dikembangkan dengan berorientasi pada tujuan yang jelas.
- 2) Bersifat sederhana, realistis, dan praktis, maksudnya perencanaan yang dibuat tidak bersifat muluk-muluk.
- 3) Terperinci, maksudnya harus memuat segala uraian dan klasifikasi rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan.
- 4) Memiliki fleksibilitas artinya perencanaan yang dibuat tidak bersifat kaku.
- 5) Terdapat perimbangan antara unsure atau komponen yang terlibat dalam pencapaian tujuan.
- 6) Diupayakan adanya penghematan sumber daya serta kemungkinan diadakannyasumberdaya tersebut di masa-masa aktivitas sedang berlangsung.
- 7) Diusahakan agar tidak terduplikasi dalam pelaksanaan.

b. Pelaksanaan

Gauzali (1993:166) menyatakan pelaksanaan merupakan manajemen yang paling utama karena dalam fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Pelaksanaan kegiatan merupakan penentuan bagi bawahan apa yang harus dikerjakan dengan pengarahan yang mencakup berbagai proses dan memerlukan metode untuk

mengatur perilaku anggota dalam aktifitas-aktifitas tertentu dan menghindari aktifitas lainnya dengan menetapkan peraturan yang ada.

Depdagri dan Depdikbud (1996:13) menyatakan bahwa “fungsi dari pelaksanaan ini disebabkan 1) adanya pernyataan bahwa seseorang akan melakukan suatu kegiatan, tugas apabila ia dorong untuk memenuhi kebutuhannya, 2) sesudah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, harus ditindak lanjuti dengan pelaksanaan kegiatan”.

Suryadi (1988:72) menyatakan bahwa “melalui pelaksanaan akan dapat memerintahkan kepada setiap anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan penuh tanggung jawab, dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan, patuh pada atasan, pemegang disiplin kerja serta bersedia untuk menyelesaikan sebaik mungkin sesuai dengan pedoman kerja”.

Pelaksanaan merupakan realisasi dari perencanaan yang telah dibuat, dengan demikian (Nawawi, 1989) mengemukakan pelaksanaan adalah “suatu proses aktivitas yang dimulai dari proses penentuan, pengelompokan, pengaturan bermacam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang, menyediakan alat-alat, mengarahkan semua bawahan dan mengkoordinasikan semua aktivitas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien”.

Pelaksanaan kelompok usaha adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu pelaksanaannya.

Pendapat pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh harus sejalan dengan kondisi yang ada baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan. Menurut Eward (1987:40) di pengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang merupakan sayarat terpentingnya berhasil suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- 2) *Resource* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan

tugas sebagai sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- 3) Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi khususnya mereka dari mereka yang menjadi implementer program.
- 4) Struktur birokrasi, yaitu standar operating producers, yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlak menurut Abdullah (1987:398) yaitu:

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- 3) Unsur pelaksana yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dalam kelompok simpan pinjaman ini kelompok memiliki dua fungsi yaitu:

- 1) Kelompok sebagai lembaga pengelola pinjaman

Yaitu kelompok yang mengelola pinjaman untuk memperkuat permodalan kelompok, memperluas pelayanan pinjaman masyarakat serta mempersingkat waktu persetujuan. Sebagai kelompok pengelola pinjaman, kelompok dapat melakukan pengelolaan dana bergulir secara mandiri, dalam hal ini kelompok dapat melakukan:

- a) Seleksi pemanfaat pinjaman
- b) Penentuan tingkat bunga
- c) Penentuan jumlah angsuran
- d) Penentuan jadwal angsuran
- e) Penentuan persyaratan pinjaman

Kelompok sebagai lembaga pengelola secara mandiri mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a) Kelompok telah berpengalaman dalam pengelolaan dana simpan dan pinjaman minimal 3 tahun
- b) Mempunyai AD/ART kelompok
- c) Mempunyai aturan kepengurusan
- d) Mempunyai aturan pengelolaan simpanan (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, bunga simpanan, dll)
- e) Mempunyai aturan pengelolaan pinjaman (persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu, dll)

2) Kelompok sebagai Lembaga Penyalur Pinjaman

Yaitu kelompok yang hanya menyalurkan dana bergulir kepada anggota kelompok sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan pemberi pinjaman (UPK), untuk itu kelompok dapat melakukan:

- a) Memastikan penggunaan pinjaman untuk kebutuhan pendanaan usaha
- b) Meningkatkan tanggu renteng
- c) Memastikan penyaluran dan pengembalian pinjaman

1) Penyerahan Dana

Setelah semua administrasi di penuhi maka penyerahan dana dari UPK ke kelompok dilakukan. Semua proses pada saat penyerahan dana maka menurut SOP yang berlaku pada Pasal 12 yaitu:

- a) Apabila dana di UPK telah tersedia dan telah tercukupi maka UPK terlebih dahulu menyampaikan kepada pengurus BKAD/BKAN, Tim Pendanaan dan BP-UPK dalam rapat intern.
- b) Setelah disepakati dengan BKAD/BKAN, TP dan BP-UPK kemudian UPK menginformasikan kepada kelompok lama yang masih dinyatakan masih layak mendapat perguliran dan mempunyai reputasi baik, termasuk menginformasikan kepada kelompok baru.
- c) UPK membuat jadwal proses/tahap perguliran.
- d) Jika proposal pengajuan memenuhi, sesuai batas waktu pengajuan maka usulan kelompok dilakukan pra verifikasi oleh UPK selanjutnya verifikasi dan dibahas bersama-sama oleh Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan sesuai tahap Verifikasi (mengacu SOP Tim Verifikasi).
- e) Tim Pendanaan jika dipandang perlu dapat menganalisa, memeriksa ulang kelayakan pinjaman ke anggota kelompok bersangkutan.
- f) Musyawarah pendanaan peguliran dihadiri oleh Tim Pendanaan, BKAN, BP-UPK, UPK, Tim Penyehatan Pinjaman, TV dan (PJOK dan FK/T jika masih ada program) untuk menentukan jumlah besaran dan pinjaman kelompok.
- g) Keputusan Pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pendanaan, informasi pendanaan harus diinformasikan

kepada kelompok calon penerima manfaat maksimal 2 minggu setelah terbit surat keputusan pendanaan dan diumumkan melalui papan informasi

- h) Jangka waktu pinjaman untuk kelompok penyalur maksimal 18 bulan
- i) Jangka waktu pinjaman untuk pengelolaan maksimal 36 bulan dengan ketentuan: maksimal 24 bulan hanya membayar jasanya saja dan 12 bulan hanya membayar pokok, saat pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu kapan dibutuhkan kelompok.

Penjelasan PTO IV PNPM –LMP mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan PNPM-LMP yaitu:

1) Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

MAD dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan.

2) Musyawarah Desa (Musdes)

Dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP ditingkat desa sehingga pelaku-pelakutingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan proses lanjutan.

3) Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah didusun dengan proses sebagai berikut:

- a) Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut diatas termasuk kondisi anggota.

- b) Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: kelompok pemula, kelompok berkembang, dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok.
- c) Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan.
- d) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri: daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan pemanfaat yang diusulkan, peta sosial dan peta RTM, rekap kebutuhan pemanfaat
- e) Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan hasil tahapan seleksi ditingkat desa adalah:
 - (1) Penentuan Usulan Desa adalah proses penentuan keputusan usulan desa yang akan dikompertisikan di tingkat kecamatan. Hasil keputusan diajukan berdasarkan kelompok yang diajukan dalam paket usulan desa.
 - (2) Penulisan usulan kelompok

Adalah tahapan yang menghasilkan proposal yang akan dikompertisikan ditingkat kecamatan. Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut:

 - (a) Sekilas kondisi kelompok SPP
 - (b) Gambaran Usaha dan rencana yang menjelaskan: a. kondisi anggota, b. kondisi permodalan, c. kualitas pinjaman, d. kondisi operasional.
 - (3) Rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang.
 - (4) Perhitungan rencana kebutuhan dana
 - (5) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta RTM.

c. Pengawasan

Dalam suatu organisasi fungsi pengawasan sangat dibutuhkan dengan pengawasan yang baik dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin bahwa pelaksanaan dari kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Siagian (1982:135) menyatakan pengawasan adalah “proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sihombing (1977:11) menyatakan “pengawasan adalah proses pengamatan dari keseluruhan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang akan datang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Siagian dalam Sudjana (2004:214) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui dan menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Langkah-langkah dalam melakukan pengawasan (Liputo:173) adalah:

- 1) Menentukan standar kegiatan
- 2) Mengukur kegiatan yang nyata terjadi
- 3) Membandingkan kegiatan dengan standar

Lebih lanjut menurut Kadarman (2001:195) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk

merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Jadi pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif mungkin didalam mencapai tujuan.

Ernie dan Sefulah (2005:12) menyatakan fungsi pengawasan adalah:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan
- 3) Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah:

- 1) mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan
- 2) memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama timbulnya kesalahan baru.

Setelah dana cair maka dilakukan pengawasan secara rutin oleh UPK, yang mana dengan cara pembinaan kelompok setiap bulannya sebelum penyetoran dana. Kelompok diberikan berupa:

- 1) Buku kas
- 2) Buku tabungan
- 3) Buku kredit anggota
- 4) Buku rekening Bank kelompok

Ketiga buku pendukung tersebut UPK dapat mudah memantau dan melihat perkembangan simpanan anggota dan angsuran kelompok dan permasalahan dapat terdeteksi dengan mudah nya. Pengelolaan dana langsung masuk ke buku tabungan rekening bank.

Menghindari terjadinya penyelewengan maka pembinaan yang dilakukan UPK adalah dengan cara:

- 1) Kunjungan ke pengurus dan anggota kelompok

Pendampingan ini adalah bentuk pendampingan yang paling mudah dilakukan. Melalui kunjungna ini UPK dapat mengetahui kebutuhan, kesulitan yang dihadapi oleh kelompok dan anggotanya sekaligus dapat dicarikan pemecahannya.

- 2) Kunjungan pada pertemuan kelompok

Bentuk pendampingan ini adalah dengan mengunjungi kelompok pada saat kelompok menyelenggarakan pertemuan, dengan kunjungan dari UPK,

pengurus kelompok dan anggota kelompok akan merasa bangga karena diperhatikan, kunjungan seperti ini cukup efektif karena sekaligus kunjungan bisa bertemu dengan semua pengurus dan anggotanya, UPK dapat memberikan penyuluhan dan memeberikan informasi

3) Fasilitasi pertemuan

Pertemuan antar kelompok ini penting untuk saling tuksr menukar informasi dan pengalaman, melalui pertemuan antar kelompok dapat difasilitasi kerjasama antar kelompok

4) Pendampingan tertib administrasi kelompok

Secara periodik UPK perlu datang ke kelompok untuk memeriksa aministrasi keuangan kelompok. Pada kesempatan tersebut UPK sekaligus dapat membimbing bagaimana membuat administrasi keuangan yang baik dan benar

5) Pendampingan penguatan permodalan kelompok

Secara periodic UPK datang ke kelompok untuk memeriksa ketaatan kelompok dalam membayar iuran, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela kepada kelompok, pada kesempatan tersebut UPK dapat memeriksa keuangan kelompok

6) Pelatihan pengurus kelompok

Pelatihan seperti ini penting sekali bila kelompok mengalami masalah yang sama, sehingga dengan pelatihan dapat dipecahkan, masalah yang efektif dipecahkan melalui pelatihan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan

7) Pelatihan anggota kelompok

Pelatihan anggota kelompok memang bisa dilakukan oleh kelompok, utamanya kelompok yang sudah mantap, karena sebagian besar kelompok pada umumnya belum mantap, maka pelatihan anggota dapat dilakukan oleh UPK maupun oleh nara sumber lain dengan difasilitasi oleh UPK.

8) Pengembangan jaringan kelompok

UPK dapat memfasilitasi kelompok untuk kerjasama dengan pihak lain, (swalayan, pemasok, instansi pemerintahan).

4. Kelompok Usaha

a. Kelompok

Sherif and Sherif (1956) menyatakan bahwa kelompok adalah suatu unit social yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi social yang cukup intensif dan teratur sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu.

Kelompok diciptakan oleh masyarakat dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lain, serta biasanya memiliki suatu kesukaan yang sama. Menurut Soerjono Soekanto kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan diantara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.

Devito (1997) menyatakan kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang

sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur diantara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma, atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya.

Soejono Soekanto menyatakan, suatu kelompok memiliki beberapa ciri utama yang menunjukkan kelompok:

- 1) Setiap anggota harus saling menyadari bahwa mereka adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok.
- 2) Adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok.
- 3) Adanya faktor yang mempererat kebersamaan para anggotanya, semisal persamaan nasib.
- 4) Memiliki sistem dan proses yang jelas dan dijalankan anggota kelompok.

Homans (1950) menyatakan: kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota setiap langsung.

Manfaat dari kelompok adalah: orang lain menjadi sumber informasi yang sangat penting, kelompok juga menjadi bagian penting dari identitas kita, yang mendefinisikan siapa diri kita, dan kelompok membantu menegakkan norma sosial, aturan yang eksplisit atau implisit mengenai perilaku yang dapat diterima.

b. Usaha

Taufik Baharuddin usaha adalah menyatakan kemampuan untuk melakukan atau menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang diidealkan.

Menurut Harnaizar, usaha merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, didirikan dan berkedudukan disuatu tempat.

Skinner(1992) menyatakan usaha atau bisnis adalah pertukaran barang atau jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Jadi usaha dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia mendapatkan penghasilan baik berupa uang atau pun barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Oleh karena itu sasaran dari usaha atau keuntungan, baik diperoleh secara langsung atau tidak langsung.

c. Kelompok Usaha

Kelompok usaha adalah himpunan dari keluarga dan perempuan yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Depsos RI, 2005).

Pengertian kelompok usaha adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga atau keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang atau keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Sasarannya adalah penerima bantuan stimulant pemberdayaan adalah para keluarga yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan kelompok usaha, namun kondisi usaha ekonomi produktifnya mengalami hambatan dan kegagalan dan memerlukan bantuan tambahan modal usaha.

d. Mekanisme kegiatan kelompok usaha

Kelompok usaha terdiri atas 10-20 orang (KK) fakir miskin yang telah terpilih melalui seleksi sebagai kelompok usaha adanya kemauan anggota kelompok usaha untuk bekerja secara kelompok dan adanya kesamaan minat dari anggota untuk melaksanakan suatu jenis usaha melalui kegiatan kelompok.

Kelompok usaha dibentuk berdasarkan musyawarah bersama antar anggota (hasil seleksi). Penentuan jenis kegiatan usaha kelompok dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan potensi alam yang ada. Terhadap kelompok yang telah terbentuk diberikan latihan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilaksanakan.

e. Kepengurusan

1) Ketua

Rincian tugas: bertanggung jawab kepada rapat kelompok, memimpin dan bertanggung jawab atas kelangsungan kelompok, memimpin seluruh kegiatan kelompok, membimbing dan mengawasi serta mengarahkan sekretaris dan bendahara kelompok membagi tugas atau menugasi anggota kelompok untuk melaksanakan sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok, mengambil keputusan sesuai dengan kebijaksanaan dan hasil musyawarah kelompok, berhubungan atau konsultasi dengan para pembina, melaksanakan pengelolaan,

pemeliharaan dengan kesepakatan kelompok, memeriksa dan menutup buku kas serta memeriksa buku catatan administrasi lainnya dan melaporkan perkembangan kelompok usaha secara berkala pada anggota dan Pembina.

2) Sekretaris

Membantu ketua dalam melaksanakan administrasi kelompok, mewakili ketua apabila berhalangan, mengundang rapat kelompok atas perintah ketua, mencatat hasil keputusan rapat kelompok, mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota, menyusun laporan untuk rapat kelompok, mengisi buku administrasi kelompok dan membantu ketua dalam memimpin kegiatan kelompok.

3) Bendahara

Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang kelompok usaha, menyimpan segala penerimaan keuangan kelompok, membayar dan atau mengeluarkan uang untuk sesuatu keperluan yang telah disetujui oleh ketua, membuat buku catatan pembantu tentang usaha ekonomi produktif kelompok, melaporkan keadaan keuangan kelompok usaha dalam rapat kelompok, musyawarah kelompok merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam hal antara lain: memilih dan menetapkan pengurus kelompok usaha, menentukan pembagian kerja anggota kelompok, menentukan kebijaksanaan, langkah serta keputusan, bersama-sama dengan pengurus membuat rincian tugas pengurus dan anggota kelompok usaha.

4) Mekanisme Pengembangan Bantuan

f. Perguliran

Kelompok usaha yang mendapatkan bantuan diwajibkan melaksanakan perguliran kepada warga lain yang membutuhkan disekitarnya baik secara perorangan maupun secara kelompok jumlah dan besarnya dana yang digulirkan sesuai dengan bantuan stimulant yang diterima adapun waktu pelaksanaan perguliran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota kelompok dengan Pembina.

g. Pembagian hasil atau keuntungan

Pengelola bersama kelompok bertanggung jawab terhadap pembagian keuntungan atau kerugian yang diderita kelompok. Setiap keuntungan atau kerugian wajib dilaporkan kepada seluruh anggota. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan kelompok atau didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab anggota.

D. Simpan Pinjam Perempuan

Melayu SP Hasibuan (1996) menyatakan simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyaurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat.

Jadi Simpan Pinjam Perempuan merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggotanya kaum perempuan untuk menyimpan dan meminjam untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Ninik Widayanti (2003) menyatakan “simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara

teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kemabali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.

Umar Burhan (1989) menyatakan “ simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati”.

Jadi simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan pada saat itu dimana pengurus menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.

SOP Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Enam Lingkung Bab 1, Pasal 7 dan 8 tentang Ketentuan Umum menyatakan bahwa:

Pengelolaan kelompok adalah upaya agar tumbuh dan berkembangnya kelompok, kegiatan simpan pinjam serta usaha ekonomi produktif sesuai dengan kemampuan masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan. Pengelolaan dana bergulir adalah upaya memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Baik dari sisi aspek pemberdayaan, system dan proses perencanaan, aspek dukungan pemerintahan serta aspek prinsip-prinsip PNPM harus mampu memberikan dampak perubahan positif dan berkelanjutan terhadap masyarakat.

1. Sifat dan Prinsip Pengelolaan Dana

Sifat dan prinsip dari pengelolaan dana bergulir yang telah diatur di dalam SOP Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Enam Lingkung pada Bab IV, Pasal 4 berbunyi:

- a. Sifat dan prinsip pengelolaan kelompok dan bergulir merupakan acuan dalam setiap pola tindakan dan kebijakan bagi pengelolaan kelompok dan dana bergulir yang terkait didalamnya.
- b. Sifat pengelolaan kelompok dan dana bergulir adalah mudah, cepat dan lestari.
- c. Prinsip pengelolaan kelompok dan dan bergulir: keberpihakan kepada rumah tangga miskin, transparasi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitas keberlanjutan, dan kesetaraan gender.

2. Aturan dalam Pengelolaan Dana

Standar Operasional Pengelolaan Dana Kelompok UPK Kecamatan Enam Lingkung aturan dalam perguliran dana meliputi:

- a. Musyawarah antar desa perguliran (MAD/MAN Perguliran) dilaksanakan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.
- b. Musyawarah antar desa perguliran (MAD/MAN Perguliran) menteapkan peringkat usulan yang mengajukan kredit.
- c. Pendanaan kredit disesuaikan dengan perkembangan/ketersediaan dana yang ada di UPK minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dana yang tersedia di rekening SPP.
- d. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.

- e. Pinjaman hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM.
- f. Semua kelompok perempuan SPP yang ada di wilayah Kecamatan Enam Lingkung berhak mengajukan pinjaman dana bergulir.
- g. Kelompok yang berhak memperoleh dana perguliran adalah:
 - 1) Kelompok lama yang sedang tidak mempunyai tanggungan pinjaman ke UPK, masih dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi/Tim Pembahas Pendanaan (TPP).
 - 2) Kelompok baru yang sedang tidak mempunyai tanggungan pinjaman ke UPK dan atau lembaga keuangan lainnya, dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi/Tim Pembahas Pendanaan (TPP).
- h. Tingkat suku bunga sebesar 10% untuk 12 bulan dan 15 % untuk 18 bulan.
- i. Pinjaman awal maksimal 5 juta dinyatakan dengan kegiatan dan kemampuan kelompok untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulan dan maksimal pinjaman selanjutnya yang dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi/Tim Pembahas Pendanaan.
- j. Untuk pinjaman kedua maksimal 8 juta dan pinjaman ketiga diberikan sesuai studi kelayakan usaha hasil dari Verifikasi dan Tim Pendanaan.
- k. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok.

- l. Jika kelompok sudah sampai batas maksimal pinjaman, maka UPK akan memberikan rekomendasi agar kelompok tersebut akses ke lembaga keuangan diluar UPK seperti BRI atau lainnya.
- m. Pinjaman tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek.
- n. Jika pinjaman disalurkan ke kelompok dengan pola Executing harus memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengelola pinjaman
- o. Permasalahan kelompok diatur tersendiri mengacu kepada tatacara penanganan masalah dalam PTO dan Kearifan Lokal.

E. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan campur tangan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun, penanganannya selama ini tidak berkelanjutan. Peran usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Untuk itu diperlukan perubahan yang terarah dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan telah dilakukan sejak tahun 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah pembinaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan program IDT, Khususnya dalam rangka peningkatan keterpaduan dan kesinambungan kegiatan sosial ekonomi dan prasarana pedesaan pemerintah tetap melanjutkan program bantuan kepada masyarakat melalui bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan sesuai dengan buku petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM)-mandiri pedesaan (Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan, 2008) mengatakan :
 “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan adalah Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dimana menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.”

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan itu adalah Program yang dibuat oleh pemerintah nasional dan dalam implementasinya dikoordinasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin lewat rangsangan kemampuan pribadi dalam bentuk pemberian dana bantuan sebagai modal dalam meneruskan usahanya.

a. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Tujuan umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2) Tujuan Khusus

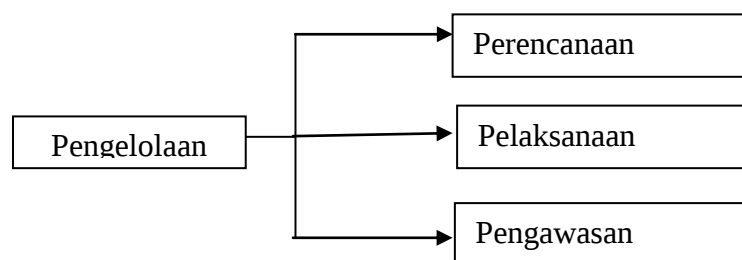
- a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
- e) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Gunawan Nim 2010/17993, yang diteliti adalah Gambaran Pembinaan sikap oleh pimpinan koperasi simpan pinjam perempuan di PKK Jorong Padang Durian Hijau, fenomena penelitian ini adalah (a) kegiatan koperasi yang berjalan cukup aktif, (b) Respon positif dari masyarakat terhadap koperasi ini, (c) dukungan yang tinggi dari anggota, (d) adanya pembinaan terhadap sikap anggota melalui kognitif, afektif dan konatif. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengelolaan kelompok usaha simpan pinjam perempuan PNPM di Korong Batiah-Batiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan di atas.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam perencanaan pada kegiatan kelompok usaha simpan pinjam PNPM-LMP di Korong Batiah-Batiah sudah berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan yang telah disusun oleh pengelola atau pengurus dan mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya.
2. Pembinaan dalam pelaksanaan pada kegiatan kelompok usaha simpan pinjam PNPM-LMP di Korong Batiah-Batiah terlaksana dengan baik. Ini terbukti dengan kegiatan kelompok usaha yang telah terlaksana seperti yang telah dilaksanakan oleh pengurus atau pengelola dan anggota kelompok.
3. Pembinaan dalam pengawasan pada kegiatan kelompok usaha simpan pinjam PNPM-LMP di Korong Batiah-Batiah terlaksana dengan baik, dapat dilihat bahwa pengurus melakukan monitoring, bimbingan, dan kunjungan kepada anggota kelompok usaha, sehingga semua kegiatan berjalan terlaksana dan masalah yang ada dapat terselesaikan, semuanya berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang baik dilakukan oleh pengelola dalam kegiatan pengelolaan kelompok usaha simpan pinjam ini, maka hasilnya dan prestasi yang dicapai maka baik juga. Dapat dilihat dari perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik dan pengawasan yang baik juga.

B. Saran

Temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pengurus agar melakukan pembinaan dalam perencanaan kegiatan kelompok usaha berdasarkan keperluan dan kebutuhan anggota kelompok usaha.
2. Kepada pengurus agar melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok usaha untuk dapat ditingkatkan lagi supaya berkembang lebih baik dari sebelumnya.
3. Kepada pengurus melakukan pengawasan pembinaan secara berkelanjutan ke tempat anggota kelompok usaha, agar dapat mengetahui perkembangan usaha anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian* Jakarta :PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Faisal, Sanapiah. 1981. *Penidikan Luar Sekolah*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gerungan. 2009. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Kerto, Negoro. 1983. *Prinsip-prinsip dan Teknik Manajemen*. Yogyakarta: Anada
- Liputo, Benyamin. 1988. *Pengantar Manajemen*: IKIP Bandung
- Moekijat, 1983. *Latihan Pengembangan Pegawai*. Bandung: Alumni
- Nawawi, Handari. 1984. *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Graha Indonesia
- Rahardjo. Adi Sasmita 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmadani, Amelia. 2009. *Persepsi Peserta Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Disertasi tidak diterbitkan. PLS UNP
- Saydam, Gouzali. 1993. *Manajemen dan Kependidikan*. Jakarta: Djambatan
- Siagian, Sondang P. 1982. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Sihombing, Umberto. 2001. *Pendidikan Luar Sekolah Masalah, Tantangan Dan Peluang*. Jakarta: CV. Wirakarta.
- SOP Pengelolaan Kelompok dan Perguliran, UPK Enam Lingkung
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sudjana H.D. 1993. *Strategi dan Teknik Pembelajaran PLS Asas*: Bandung: Nusantra Press. ak diterbitkan. Padang: PLS UNP
- Sudjana, H.D. 2004. *Manajamen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production

- Suryadi. 1998. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Indonesia
- Terry. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Tifani, Arvila. 2013. *gambaran pengelolaan program english computer pada lembaga kursus widyaloka menurut persepsi warga belajar dikelurahan enam suku kota solok*. Skripsi tidak diterbitkan. Padang: PLS UNP
- Undang-Undang No. 23 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional NO.20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 3
Tentang Pendidikan Pepemudaan.
- Usman. Husaini. 200. *Manajemen Teori Prektek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winardi.1986. *Asas-manajemen*. Bandung: PT. Alumni.
- Wirawan, Sarlito. 2011. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Zuriah, Nurul. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial, Pendidikan, Teori dan Aplikasi*. Malang: Bumi Aksara
- Yusuf, Muri. 2007. *Prosedur penelitian*. Padang: UNP Press
- Online (<https://bahagiamuddin.wordpress.com/2013/02/09/peran-kelompok-spp-pnpm/>) diakses 3 Desember 2014